

# PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMI COVID-19 PADA INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**JKMA**Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas  
diterbitkan oleh:Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

p-ISSN 1978-3833

e-ISSN 2442-6725

15(1)26-35

@2020 JKMA

<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/>Diterima 09 September 2020  
Disetujui 7 Desember 2020  
Dipublikasikan 22 Maret 2021**Nofriya<sup>1</sup>✉, Putri Nilam Sari<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Program Studi Teknik Lingkungan, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, Padang, Sumatera Barat, 25171<sup>2</sup>Departemen K3 dan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, 25163

## Abstrak

Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pariwisata berkurang secara drastis dan berdampak pada perekonomian. Dengan adanya konsep new normal, pemerintah kembali membuka kegiatan pariwisata dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan ini juga diberlakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi, perlu kebijakan yang jelas untuk setiap jenis industri yang berkaitan dengan kepariwisataan karena potensi penularannya berbeda tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada regulasi dari pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pariwisata, namun pada pelaksanaan di lapangan, belum ada kontrol yang jelas sehingga masih memungkinkan terjadinya potensi penularan COVID-19. Dengan adanya peraturan Adaptasi Kebiasaan Baru, diharapkan semua masyarakat khususnya pelaku wisata memahami dan mengaplikasikan protokol kesehatan lebih baik lagi, untuk mengurangi potensi penularan COVID-19 di sektor pariwisata.

**Kata kunci:** Pariwisata, New normal, COVID-19, Adaptasi Kebiasaan Baru

## PREVENTION OF THE SPREAD OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE TOURISM INDUSTRY IN PADANG PARIAMAN REGENCY

## Abstract

The COVID-19 pandemic has drastically reduced tourism activities and has significant impact on the economy. With the new normal concept, the government has re-opened tourism activities by implementing strict health protocols. This policy is also enforced in Padang Pariaman Regency. However, it is necessary to have clear guidelines for each type of tourism industry related to tourism because the potential for transmission is different depending on the activities carried out. This study aims to examine the handling and prevention of the spread of the COVID-19 pandemic in the tourism sector, especially in Padang Pariaman Regency. The results show that there are regulations from the government regarding the application of health protocols in tourism activities. However, there is no direct control in its implementation, so that still possible for potential transmission of COVID-19. With the existence of the New Habit Adaptation regulation, it is expected to all people, and especially tourism actors, will understand and apply better health protocols to reduce the potential for COVID-19 transmission in the tourism sector.

**Keywords:** Tourism, New normal, COVID-19, New Habit Adaptation

### ✉ Korespondensi Penulis:

Program Studi Teknik Lingkungan, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang,  
Jl. Prof. Dr. Hamka No.121, Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171 Email: [nofriyafirdaus@gmail.com](mailto:nofriyafirdaus@gmail.com)

## Pendahuluan

Pada bulan Desember 2019, ditemukan penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Kota Wuhan, China. Kemudian pada awal Januari 2020, pemerintah setempat mengkonfirmasi 41 pasien terinfeksi oleh virus corona jenis baru (*novel coronavirus*)<sup>(1)</sup>. Untuk menghentikan penyebaran virus tersebut, Kota Wuhan diisolasi sehingga jumlah kasus di daerah tersebut menjadi stabil pada pertengahan Februari<sup>(2)</sup>. Akan tetapi, transportasi udara global telah mulai menyebarkan virus COVID-19 ke semua benua<sup>(3)</sup>.

Terjadinya infeksi COVID-19 yang cukup masif menyebabkan terdapat kebijakan pembatasan perjalanan manusia antar daerah. Kondisi ini berdasarkan pada konteks epidemiologi dan surveilans penyakit yang menyatakan bahwa perjalanan atau perpindahan manusia merupakan salah satu faktor yang menyumbang tingginya angka penyebaran penyakit, dan hal ini termasuk pada sektor pariwisata<sup>(4)</sup>. Pada kondisi pandemi sebelumnya, seperti SARS, flu babi, demam berdarah dan Ebola, kegiatan wisata menyumbang risiko penularan yang tinggi<sup>(5)</sup>. Hal ini terutama teridentifikasi pada orang-orang yang berada di pesawat terbang, kapal pesiar dan perjalanan wisata berkelompok<sup>(6)</sup>.

Kebijakan pembatasan perjalanan dilakukan hampir di seluruh dunia dalam skala internasional, regional dan lokal sehingga berdampak pada sistem pariwisata. Selain membatasi risiko pada wisatawan, kebijakan pembatasan perjalanan ini dibuat sebagai bentuk kekhawatiran bahwa wisatawan yang terinfeksi dapat menyebarkan penyakit ke penduduk lokal<sup>(7)</sup>. Di beberapa negara kondisi ini mempengaruhi semua rantai sektor pariwisata, termasuk penutupan objek wisata, perhotelan, layanan restoran dan penurunan penggunaan transportasi umum<sup>(8)</sup>. Organisasi Pariwisata PBB (*United Nations World Tourism Organization*) pada siaran pers tanggal 6 Maret 2020 memperkirakan pandemi COVID-19 akan menyebabkan penurunan akitifitas wisata 1-3% daripada pertumbuhan yang diperkirakan<sup>(9)</sup>. Namun tiga minggu kemudian, pada tanggal 26 Maret 2020 data ini diperbaharui menjadi 20-

30%<sup>(10)</sup>.

Kondisi ini juga terjadi secara signifikan di Indonesia. Pada semester awal tahun 2020, terjadi penurunan wisatawan mancanegara (*wisman*) sebanyak 59,96% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya<sup>(11)</sup>. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penangguhan penerbangan internasional visa kedatangan dari beberapa negara. Pemerintah juga menerapkan pemeriksaan kesehatan di banyak lokasi termasuk bandara, pelabuhan laut dan terminal. Kemudian terjadi penurunan jumlah wisatawan nusantara (*wisnus*) karena pelarangan mudik/pulang kampung saat cuti bersama Idul Fitri agar mengurangi pergerakan orang untuk mengunjungi kerabat dan melaksanakan kegiatan rekreasi<sup>(12)</sup>.

Kemunduran kegiatan pariwisata ini berdampak terhadap penurunan kondisi ekonomi masyarakat terutama yang berkecimpung di dunia pariwisata. Sektor wisata yang sebelumnya menyumbang devisa kedua terbanyak bagi negara, mengalami penurunan yang sangat jauh dari yang diharapkan yaitu sekitar 87,8%<sup>(13)</sup>. Desakan untuk segera dilakukannya normalisasi, khususnya untuk memulihkan sektor ekonomi dilakukan dengan kebijakan "*new normal*". *New normal* adalah gagasan WHO untuk semua lini agar dapat melaksanakan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan COVID-19 dalam kegiatan sehari-hari<sup>(14)</sup>.

Hal ini juga dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan kembali dibukanya sektor pariwisata dengan prinsip Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 (TNBPAC)<sup>(15)</sup>. Akan tetapi, sejak pemerintah mencanangkan kebijakan *new normal*, khususnya sejak adanya himbuan agar perantau minang dapat pulang kampung untuk merayakan Idul Adha pada tanggal 31 Juli 2020, peningkatan kasus positif COVID-19 di Sumatera Barat juga terjadi dengan sangat cepat. Kasus kumulatif yang terkonfirmasi positif pada awal bulan Agustus 2020 sebanyak 154 orang meningkat dengan pesat menjadi 1825 orang pada 19 September 2020. Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi salah satu daerah yang mengikuti kebijakan *new normal* dalam kegiatan pariwisata. Akan tetapi, COVID-19

masih menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan karena kasus kumulatif yang terkonfirmasi positif di daerah ini telah mencapai 164 orang dengan jumlah kematian sebanyak 3 orang<sup>(16)</sup>. Selain itu daerah ini termasuk daerah yang memiliki kelompok usia tua yang tinggi, serta memiliki penduduk dengan komorbid diabetes mellitus terbanyak kedua setelah Kota Padang sehingga meningkatkan risiko fatalitas COVID-19<sup>(17)</sup>.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa saat pandemi SARS pada tahun 2003, sektor pariwisata menerapkan promosi kesehatan mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan bagi pelaku wisata dan wisatawan itu sendiri sampai akhirnya komunitas pariwisata pulih secara bertahap<sup>(18)</sup>. Akan tetapi, dengan skala COVID-19 yang jauh lebih besar, pariwisata memerlukan sebuah 'jembatan' berupa persiapan yang cukup matang dan komitmen semua pelaksana wisata untuk mencegah memburuknya kasus fatal akibat COVID-19 sembari mencegah keterpurukan ekonomi di sektor wisata. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 penelitian-penelitian terfokus kepada bagaimana mengembalikan perekonomian yang disumbangkan dari pariwisata serta membahas program pemerintah yang telah dijalankan untuk mengurangi penyebaran virus corona dari kegiatan perjalanan dan transportasi<sup>(12,19)</sup>. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pemahaman khususnya bagi pelaku pariwisata agar sektor wisata tidak menjadi kluster penyebaran virus corona selanjutnya. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai suatu hal secara mendalam dan holistik sehingga mengungkapkan bagaimana realita tersebut berjalan sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan kebenaran ini, peneliti mencari tahu langsung mengenai objek yang diteliti, dan objek memberikan jawaban langsung kepada peneliti. Data dikumpulkan menggunakan

wawancara mendalam, telaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, catatan lapangan, foto, video dan rekaman.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 7 orang informan yang dianggap mengetahui seluk beluk penelitian sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Wisata di Dinas Pariwisata, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nyarai, Pengelola Anailand Rekreasi, Pengelola wisata pantai Tiram, pemilik hotel dan restoran. Alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman wawancara, formulir catatan wawancara dan *voice recorder*. Selain itu dilakukan observasi mengenai kondisi lingkungan di beberapa objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman.

Data diolah dengan menyalin hasil wawancara ke dalam transkrip wawancara. Setelah itu data direduksi sesuai dengan tema menggunakan matriks agar data yang didapatkan lebih terorganisir. Untuk menjamin validasi data dilakukan triangulasi hasil wawancara, dengan hasil observasi dan telaah dokumen. Analisis penelitian dilakukan dengan teknik analisis tema dan isi (*content analysis*), yaitu melakukan klasifikasi data hasil penelitian sesuai dengan kesamaan ciri dan dibandingkan dengan teori.

## Hasil

### Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata

Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, pada tanggal 17 April 2020, Sumatera Barat mulai melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/260/2020. Penetapan PSBB di Sumatera Barat dilakukan setelah dilakukannya kajian epidemiologis dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial ekonomi dan aspek lainnya oleh tim teknis.

"Jelas yang pertama sekali kalau COVID-19 ini mulai mewabah itu semua tempat wisata ditutup, jadi semua pelaku pariwisata habis, ekonomi terimbas, pelaku pariwisata itu termasuk penginapan restoran

kan kalau dia tutup tentu pengunjung tidak ada, yang pajak itu kan dari pengunjung. Tapi yang namanya tempat wisata kan, belum dibuka udah datang, apalagi di tempat yang nggak berbayar." (Inf-1)

"Karena adanya pandemi kan sebenarnya bagus buat kebersihan lingkungan, airnya, trus sampah juga berkurang. Tapi yang biasanya mandu wisata gak punya uang." (Inf-2)

"Jadi kita selama PSBB ya itu nol kunjungan, kawan-kawan pemandu beralih usahanya, dan kita usulkan untuk mendapat bantuan dari pemerintah karena terdampak COVID-19." (Inf-3)

"Kalau secara ekonomi kita sekarang ini dibawah 50% dari normal biasa, kalau dari tenaga kerja tidak ada PHK." (Inf-4)

"Kegiatan berhenti total disaat PSBB. Kondisi lebaran kemaren juga dirasa belum benar-benar pulih." (Inf-5)

"Memang kunjungan sangat menurun ya, boleh dikatakan saat PSBB gak ada sama sekali" (Inf-6)

"Kita sempat tutup saat PSBB, karena memang gak jual beli seperti biasa juga." (Inf-7)

Dari keterangan informan dapat disimpulkan bahwa program PSBB berdampak kepada perekonomian masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata. Dalam periode PSBB ini pemerintah diminta untuk konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat serta mengoordinasikan kabupaten/kota untuk mempersiapkan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak. Hasil observasi menunjukkan bahwa belum semua sektor yang berkaitan dengan wisata pulih walaupun objek wisata alam yang tidak berbayar tetap dikunjungi pengunjung tanpa penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam periode PSBB tersebut, terdapat dua kali perpanjangan tahapan PSBB. Tahap pertama PSBB dilaksanakan mulai tanggal 22 April sampai 5 Mei 2020, kemudian diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020 untuk tahap ke dua, dan periode ketiga diperpanjang kembali sampai 7 Juni 2020 hingga akhirnya pemerintah menetapkan era *new normal* mulai tanggal 8 Juni 2020. Masyarakat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 23-24 Mei 2020 yang bertepatan

dengan PSBB tahap kedua. Akan tetapi, pada libur hari raya Idul Fitri tersebut, masyarakat tetap melaksanakan rekreasi khususnya ke lokasi wisata yang tidak berbayar.

### Upaya pemulihan sektor wisata setelah pandemi

Upaya pemulihan kegiatan pariwisata dimulai sejak berakhirnya masa PSBB pada tanggal 7 Juni, sampai dengan tanggal 13 Juni. Pada masa ini, pemerintah daerah menyiapkan peraturan mengenai penerapan protokol kesehatan pada setiap sektor yang bergerak di bidang pariwisata. Selain itu, ketua Pokdarwis dan pengelola sarana pariwisata mulai aktif untuk kembali mempromosikan kegiatan pariwisata dengan mengikuti protokol kesehatan.

"Kita menyiapkan semua regulasi, artinya hal-hal yang berhubungan dengan protokol COVID-19 ini. Setiap pengelola di tempat tempat destinasi wisata diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun, masker, jaga jarak. Kemarin ini juga menginginkan seluruh pelaku wisata itu di uji swab, hasilnya negatif." (Inf-1)

"Untuk pemulihan sektor, pemandu kita sudah test swab kemaren. Alhamdulillah negatif." (Inf-2)

"Dari pemerintah biasanya kita kemarin kita dapat bantuan berupa alat APD, handsanitaizer, thermo gun, baju yang putih itu hazmat kan untuk tenaga medis itu jarang kita gunakan, tes swab gratis. Kelompok yang memandu itu perlu aman dari COVID-19." (Inf-3)

"Kita sekarang promosi ke komunitas-komunitas atau pribadi yang dananya dari mereka sendiri tanpa terikat izin dengan pemerintah untuk berwisata." (Inf-4)

"Tiram ada diberi bantuan masker, sarung tangan dan hand sanitizer dari dinas. Hanya diterapkan saat liburan idul fitri saja sekarang sudah tidak ada lagi. Baiknya menerapkan prokes tapi penerapannya paling 2 minggu, setelah itu tidak ada lagi." (Inf-5)

"Setelah boleh aktifitas kembali, kita promosi dan kita menerapkan standar *new normal*." (Inf-6)

"Kita buka perlahan, staf kita diperiksa kesehatannya supaya bebas COVID-19." (Inf-7)

Dari keterangan informan didapatkan informasi bahwa semua pelaku wisata mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktifitas

dengan penerapan protokol kesehatan. Dari hasil observasi ditemukan telah terdapat fasilitas cuci tangan pakai sabun di beberapa objek wisata, hotel dan restoran, tersedianya *handsanitizer* serta pemandu wisata dan pengunjung yang menggunakan masker.

#### **Upaya penerapan protokol New Normal**

Pada tanggal 13 Juni 2020, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membuka kembali kegiatan pariwisata. Sejak berakhirnya PSBB, pemerintah mempersiapkan semua regulasi untuk penerapan protokol *new normal* di setiap objek wisata. Pengelola pariwisata diminta untuk menjadikan fasilitas cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker setiap saat dan menerapkan *physical distancing*. Selain itu semua pengelola pariwisata dan hotel difasilitasi untuk tes swab gratis, diberikan alat pengukur suhu tubuh (*thermometer*) dan APD berupa hazmat suit jika diperlukan. Jika pengelola wisata telah menerapkan protokol yang ditetapkan, pemerintah memperbolehkan untuk kembali membuka kegiatan tersebut agar wisatawan dan pengelola terlindungi dari penyebaran COVID-19.

*"Lokasi pariwisata yang berbayar itu harus menerapkan protokol kesehatan. Di lokasi tertentu seperti di makam Syekh Burhanuddin itu kita atur masuk maksimal cuma 5 orang, waktunya paling lama 15 menit." (Inf-1)*

*"Rata-rata restoran memiliki hand sanitizer, fasilitas untuk cuci tangan, 3 tempat belum ada yang menerapkan jadi rencananya kita mau sidak besok sama pak kadis." (Inf-2)*

*"Tetap dengan penerapan protokol kesehatan, kalau di arung jeram itu satu perahu empat orang, di situ baru datang cuci tangan, nggak boleh pakai masker gitu kan di lokasi rafting itu nggak boleh pakai masker karena memang membahayakan bagi pengunjung, kalau pakai masker nyebur nanti kalau masker basah kan nempel ke mulut itu bikin lemas, susah nafas dan malah beresiko, jadi ada penerapan protokol. Yang kita tau di seminar melalui webinar, COVID-19 masuk sungai air mengalir sungai yang deras itu jadi dia menjadi partikel yang nggak berarti bagi inangnya, jadi secara ilmiahnya kegiatan outdoor itu wisata ya itu aman untuk pengunjung" (Inf-3)*

*"Kalau untuk itu kita masih ada, kita wajibkan masker dan jaga jarak, dan kita banyak air kita anjurkan sering mencuci tangan." (Inf-4)*

*"Kemaren ada kerjasama dengan mahasiswa KKN Unand dalam bentuk turun ke lapangan untuk memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menerapkan prokes. Selain itu juga ada ikatan mahasiswa Ulakan Tapakis untuk membantu promosi tsb. Namun sekarang dirasa sudah dingin saja." (Inf-5)*

*"Staf kita pakai masker ya, dan kita tentunya sediakan hand sanitizer, kita berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan yang benar." (Inf-6)*

*"Kita kembalikan ke kesadaran masing-masing, protokol kesehatan kita lakukan juga." (Inf-7)*

Pada periode awal dibukanya kembali aktivitas wisata, hampir semua pelaku wisata menerapkan protokol pengamanan COVID-19. Selain itu dilakukan inspeksi mendadak oleh Dinas Pariwisata sebagai mekanisme kontrol untuk pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan. Untuk wisata religi di Makam Syekh Burhanuddin, jumlah pengunjung yang diperbolehkan adalah maksimal 5 orang untuk berziarah selama 15 menit.

Khusus untuk wisata minat khusus rafting di Lokasi Wisata Nyarai, pengunjung tidak disarankan untuk memakai masker. Hal ini disebabkan karena pemakaian masker saat berolahraga arung jeram akan membahayakan pengunjung. Masker yang terkena air akan menyebabkan pengap, susah bernapas dan berisiko tinggi jika saat melaksanakan arung jeram tiba-tiba masuk ke dalam air. Dalam 1 perahu, terdiri dari 4 orang yang akan melakukan olahraga arung jeram. Pengelola wisata Nyarai melaksanakan webinar untuk menggiatkan kembali pariwisata di lokasi ini dan menyatakan bahwa wisata air relatif aman. Pengelola menyatakan ini karena menganggap wisata di ruang terbuka dan air yang mengalir mengurangi risiko penyebaran COVID-19.

Lain halnya di lokasi wisata Pantai Tiram, di lokasi ini lebih terlihat kelonggaran pelaksanaan protokol COVID-19. Penerapan regulasi yang ketat hanya sekitar dua minggu di saat awal kebijakan ditetapkan. Himbauan penerapan protokol kesehatan juga dilakukan

oleh pengelola objek wisata bersama dengan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta ikatan mahasiswa Ulakan Tapakis. Walaupun sudah dilaksanakan beberapa kali promosi kesehatan mengenai penerapan protokol kesehatan, pengunjung tetap mengabaikan hal tersebut. Di lokasi wisata lainnya, pelaksanaan pemeriksaan suhu tubuh dengan thermo gun pada pengunjung tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tergantung dari keinginan masyarakat yang ditugaskan untuk menjaga gerbang masuk objek wisata.

### Pembahasan

Pertumbuhan pariwisata yang meningkat di dunia pada beberapa tahun belakangan ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya perkembangan teknologi yang pesat, tren dan gaya hidup serta munculnya penerbangan berbiaya rendah, sehingga aktifitas wisata menjadi terjangkau bagi semua kalangan. Wisatawan akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk berbagai kegiatan di atraksi wisata, belanja, akomodasi, restoran dan transportasi sehingga memberikan stimulus yang besar bagi pertumbuhan ekonomi<sup>(20)</sup>. Dengan adanya pandemi COVID-19, industri transportasi dan pariwisata terpuruk dan waktu berakhirnya tidak bisa diprediksi karena situasi pandemi yang semakin memburuk.

Seperti yang terjadi di Eropa, arus transportasi dan wisata berkurang 90%. Di Irlandia, pasien pertama yang terkonfirmasi positif ternyata telah melakukan perjalanan dari daerah yang terkena dampak di Italia Utara (yang dipercaya sebagai episenter COVID-19 terbesar kedua setelah provinsi Hubei, Tiongkok) sehingga wabah cepat menyebar dan hampir semua event kepariwisataan dibatalkan<sup>(21,22)</sup>. Seiring dengan itu, hal ini juga terjadi di benua Afrika, dimana sejak kasus pertama ditemukan di Mesir, terjadi pembatalan reservasi hotel secara besar-besaran dan penutupan destinasi wisata<sup>(23)</sup>.

Walaupun demikian, tidak sedikit industri wisata yang mencoba mencari taktik baru dalam menarik kembali minat pengunjung. Seperti di Thailand, sebuah manajemen perhotelan menyediakan paket karantina mandiri di hotel

untuk warga yang ingin isolasi mandiri selama 14 hari. Hotel memiliki tim khusus yang akan mengantarkan makanan ke kamar, peralatan makan dan sprei yang digunakan oleh tamu juga ditanagani khusus, dan memantau kondisi para tamu yang sedang karantina di kamar hotel. Jika dalam masa karantina ditemukan gejala virus corona, maka tamu di rujuk ke rumah sakit yang bekerjasama dengan hotel tersebut<sup>(20)</sup>. Hal ini diikuti di beberapa negara lainnya di dunia. Bahkan di Sumatera Barat, beberapa hotel menyediakan paket karantina bagi tamu yang berasal dari luar daerah<sup>(24)</sup>.

Di Kabupaten Padang Pariaman, dinas terkait telah melaksanakan sosialisasi dan regulasi dalam mencegah penyebaran virus corona di industri pariwisata. Akan tetapi, saat fase *new normal*, kegiatan pariwisata akan lebih berisiko karena tidak semua pengunjung melakukan karantina mandiri seperti protokol ketat yang dicanangkan saat PSBB. Oleh karena itu, diperlukan pemberian pemahaman dan pengetahuan yang baik kepada semua yang terlibat dalam industri pariwisata. Standar protokol kesehatan mutlak dipahami dan dilakukan oleh semua pelaku wisata. Pada kegiatan promosi pra kedatangan, pelaku wisata wajib untuk menyampaikan protokol kesehatan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pengunjung yang akan datang<sup>(25)</sup>.

Dengan adanya pandemi ini, masyarakat harus terbiasa untuk menahan diri dan berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui, gaya hidup masyarakat minangkabau menyukai perjalanan wisata bersama-sama, menikmati bepergian selama hari libur, dan lebih suka menghabiskan waktu luang dengan teman dan kerabat di acara yang berskala besar dalam suasana yang lebih akrab<sup>(26)</sup>. Dengan adanya protokol kesehatan yang diawasi dengan ketat, kebiasaan ini diharapkan tidak lagi dilakukan di masa pandemi sampai kondisi dinyatakan benar-benar aman<sup>(27)</sup>.

Semua pengelola objek wisata, hotel dan restoran harus menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Tidak hanya pengunjung, semua petugas dan karyawan harus diukur suhunya, dan jika terindikasi demam, mereka

tidak diperkenankan melanjutkan kegiatannya. Kemudian semua diwajibkan untuk mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*. Semua orang wajib mengatur jarak aman antara satu sama lain sekitar 1,5 m sampai dengan 2 m serta mengetahui etika batuk dan bersin. Agar semua mengetahui prosedur, perlu dipasang pengumuman-pengumuman mengenai penerapan protokol kesehatan di tempat yang strategis. Selain itu pemerintah perlu menyediakan petugas khusus untuk mengontrol hal ini<sup>(28)</sup>.

Bagi petugas bandara, hotel dan penginapan, setiap harinya perlu disediakan informasi terbaru mengenai daerah-daerah atau negara-negara yang memiliki kasus yang tinggi. Tamu yang datang akan didata mengenai riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir. Selain itu wajib dilakukan self assessment dengan mengisi formulir yang disediakan<sup>(29)</sup>. Jika memiliki risiko COVID-19 yang besar, maka tamu harus segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk pemeriksaan COVID-19.

Dalam aktifitas pembayaran di objek wisata, hotel atau restoran, pengunjung disarankan untuk melaksanakan transaksi non tunai. Pelaku wisata harus menyediakan berbagai macam pilihan untuk transaksi pembayaran non tunai, seperti bekerjasama dengan berbagai bank, menyediakan fasilitas e-money dengan cara bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang berizin<sup>(30)</sup>. Jika tidak memungkinkan, perlu disediakan alat sterilisasi untuk menjamin uang bersih dari virus dan bakteri. Tempat wisata juga harus melakukan disinfeksi secara berkala terutama pada permukaan-permukaan yang sering disentuh.

Seiring dengan itu, untuk mencegah terjadinya kluster pandemi baru dari rumah makan dan restoran, interaksi personal perlu diminimalkan. Sirkulasi udara perlu dijaga sedemikian rupa serta tata letak tempat makan harus diatur untuk memenuhi persyaratan *physical distancing*. Bagi restoran yang menyediakan makanan dalam porsi besar agar bisa dinikmati banyak orang saat *dine in*, perlu mempertimbangkan untuk menyediakan menu porsi individual untuk mencegah perpindahan

agen penyakit dari peralatan makan yang digunakan bersama. Restoran juga perlu mempromosikan *takeout* dan menyediakan layanan antar bagi wisatawan<sup>(31)</sup>.

Untuk menerapkan hal ini, diperlukan sebuah peraturan daerah agar semua pelaku wisata dan pengunjung mau untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang diatur oleh pemerintah Provinsi Bali, sebagai daerah yang memiliki pendapatan utama dari wisata, terdapat kebijakan mengenai protokol tatanan kehidupan baru untuk area publik. Dalam peraturan ini diatur secara rinci hal-hal yang akan dilakukan oleh pengelola, pelaksana dan pengunjung. Pemerintah setempat juga memberlakukan denda administratif sebesar Rp.100.000,- bagi perorangan yang tidak menggunakan masker saat melakukan kegiatan di luar rumah. Serta bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi tersebut membayar denda administratif sebesar Rp.1.000.000,-<sup>(32,33)</sup>.

Seiring dengan itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2020. Dalam perda ini juga diatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Sumatera Barat<sup>(34)</sup>. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan Perda ini, perlu regulasi khusus mengenai tempat-tempat wisata dan jenis wisata masing-masing. Seperti pada penelitian ditemukan bahwa wisata minat khusus rafting, pengunjung tidak diperkenankan menggunakan masker karena membahayakan jika masker basah dan jika tiba-tiba masuk ke dalam air. Selain itu dalam 1 perahu, terdapat 4 orang sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan *physical distancing*. Agar lebih efektif dalam pencegahan penularan COVID-19, perlu dibuat kebijakan khusus, seperti setiap kelompok yang melaksanakan arum jeram berasal dari keluarga yang sama dan tidak mencampur dengan kelompok lainnya. Tentunya hal ini bisa diterapkan setelah menerapkan *assessment* terhadap kondisi kesehatan.

Sesuai konsep pariwisata berkelanjutan, semua pelaku wisata harus memiliki ketahanan

terhadap kondisi bencana, termasuk pandemi COVID-19 yang secara resmi telah dinyatakan sebagai bencana non-alam<sup>(35)</sup>. Pada konteks kesehatan, ketahanan ini difokuskan kepada perilaku wisatawan agar merubah pola hidup bersih dan sehat untuk pembiasaan jangka panjang sehingga dapat membantu pemulihan industri pariwisata pasca COVID-19 sesuai dengan yang diharapkan.

### Kesimpulan

Kebijakan dibukanya kembali industri pariwisata saat pandemi COVID-19, akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang lebih tinggi jika tidak disertai kebijakan yang jelas. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyiapkan regulasi mengenai hal ini. Akan tetapi, perlu strategi khusus untuk setiap jenis kegiatan pada industri pariwisata karena risiko penularan akan berbeda satu sama lain. Dengan adanya Peraturan Daerah mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dalam periode pandemi COVID-19, diharapkan masyarakat memahami dan mematuhi kebijakan ini, termasuk pelaku wisata di daerah.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan dana penelitian ini dalam skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2020. Selain itu, terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya pelaku wisata yang telah membantu dalam memfasilitasi penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020;395(10223):497–506.
- Kaplan EH. Containing 2019-ncov (Wuhan) coronavirus. *Health Care Manag Sci*. 2020;1–4.
- Adiga A, Venkatramanan S, Schlitt J, Peddireddy A, Dickerman A, Bura A, et al. Evaluating the impact of international airline suspensions on the early global spread of COVID-19. *medRxiv*. 2020;
- Hon KL. Severe respiratory syndromes: travel history matters. *Travel Med Infect Dis*. 2013;11(5):285–7.
- Ala'a A, Albattat A. Current Issue in Tourism: Disease Transmission as a Potential Risk for Travellers. *Rev Integr Bus Econ Res*. 2019;8:103–14.
- Freedman DO, Leder K. Influenza: changing approaches to prevention and treatment in travelers. *J Travel Med*. 2005;12(1):36–44.
- Gautret P, Botelho-Nevers E, Brouqui P, Parola P. The spread of vaccine-preventable diseases by international travellers: a public health concern. *Clin Microbiol Infect*. 2012;18:77–84.
- Gössling S, Scott D, Hall CM. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *J Sustain Tour*. 2020;1–20.
- UNWTO. COVID-19: UNWTO calls on tourism to be part of recovery plans. [Internet]. 2020. Available from: <https://www.unwto.org/news/%0Acovid-19-unwto-calls-on-tourism-to-be-part-of-recovery-plans>.
- UNWTO. International tourist arrivals could fall by 20-30% in 2020. 2020.
- BPS. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Juni 2020 mencapai 160,28 ribu kunjungan. [Internet]. 2020. Available from: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/03/1717/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-juni-2020-mencapai-160-28-ribu-kunjungan.html>
- Hakim L. COVID-19 and the Moment to Evaluate Tourism Euphoria, Indonesia. *J Indones Tour Dev Stud*. 2020;8(2).
- BPS. Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen [Internet]. 2020. Available from: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- Dewi NPDU. Tourism Education In A New Normal Era. *Jayapangus Press Books*. 2020;405–20.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemprov

- Sumbar Siapkan Paket Wisata Bebas Covid-19 Dengan Cara Swab Gratis [Internet]. 2020. Available from: <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/pemprov-sumbar-siapkan-paket-wisata-bebas-covid-19-dengan-cara-swab-gratis/>
16. Pemprov Sumbar. Data Pantauan COVID-19 [Internet]. 2020. Available from: <https://corona.sumbarprov.go.id/>
  17. Yuniarti E, Indika PM, Dewata I, Heldi H, Barlian E. Komorbidity Mapping of COVID-19 Events in West Sumatera. *Sumatra J Disaster, Geogr Geogr Educ.* 2020;4(1):11-6.
  18. Wen J, Wang W, Kozak M, Liu X, Hou H. Many brains are better than one: the importance of interdisciplinary studies on COVID-19 in and beyond tourism. *Tour Recreat Res.* 2020;1-4.
  19. Dinarto D, Wanto A, Sebastian LC. Global health security-COVID-19: impact on Bintan's tourism sector. *RSIS Comment* 033-20. 2020;
  20. Folinas S, Metaxas T. Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-2019. 2020;
  21. BBC News. First case of coronavirus in Republic of Ireland [Internet]. 2020. Available from: <https://www.bbc.com/news/world-europe-51693160>
  22. Ghislandi S, Muttarak R, Sauerberg M, Scotti B. News from the front: Estimation of excess mortality and life expectancy in the major epicenters of the COVID-19 pandemic in Italy. *medRxiv.* 2020;
  23. Breisinger C, Abdelatif A, Raouf M, Wiebelt M. COVID-19 and the Egyptian economy: Estimating the impacts of expected reductions in tourism, Suez Canal revenues, and remittances. Vol. 4. *Intl Food Policy Res Inst;* 2020.
  24. Langgam.id. Cara Jitu Hotel di Padang Bertahan di Masa Suram Corona [Internet]. 2020. Available from: <https://langgam.id/cara-jitu-hotel-di-padang-bertahan-di-masa-suram-corona/>
  25. Beirman D. Saving Face and Promoting Tourism Safety in South East Asia. *Conversat.* 2014;
  26. Firdaus DRS, Lubis DP, Susanto D, Soetarto E. Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasar-kan Keenam Dimensi Budaya Hofstede. *J Sodality J Sociol Pedesaan.* 2018;6(2).
  27. Wen J, Kozak M, Yang S, Liu F. COVID-19: potential effects on Chinese citizens' lifestyle and travel. *Tour Rev.* 2020;
  28. Chiu N-C, Chi H, Tai Y-L, Peng C-C, Tseng C-Y, Chen C-C, et al. Impact of wearing masks, hand hygiene, and social distancing on influenza, enterovirus, and all-cause pneumonia during the coronavirus pandemic: Retrospective national epidemiological surveillance study. *J Med Internet Res.* 2020;22(8):e21257.
  29. Timmers T, Janssen L, Stohr J, Murk JL, Berrevoets MAH. Using eHealth to Support COVID-19 Education, Self-Assessment, and Symptom Monitoring in the Netherlands: Observational Study. *JMIR mHealth uHealth.* 2020;8(6):e19822.
  30. Aji HM, Berakon I, Husin MM. COVID-19 and e-wallet usage intention: A multigroup analysis between Indonesia and Malaysia. *Cogent Bus Manag.* 2020;7(1):1804181.
  31. de Freitas RSG, Stedefeldt E. COVID-19 pandemic underlines the need to build resilience in commercial restaurants' food safety. *Food Res Int.* 2020;136:109472.
  32. Pemprov Bali. Surat Edaran Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Biasa Baru Bidang Pariwisata Bali. 2020.
  33. Pemprov Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. 2020.
  34. Pemprov Sumbar. Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Disahkan, Gubernur Sumbar : Penting Dalam Pengendalian Covid 19 [Internet]. 2020. Available from: <https://www.sumbarprov.go.id/home/news/19422-perda-adaptasi-kebiasaan-baru-disahkan-gubernur-sumbar-penting-dalam-pengendalian-covid-19.html>

35. Sekretariat negara RI. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020. Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. 2020.